OMBUDSMAN BERI NILAI KEPATUHAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMDA, POLRES DAN BPN SE-RIAU TAHUN 2023, INI HASILNYA..

Rabu, 20 Desember 2023 - Enda Yuliana

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ombudsman RI Perwakilan Riau memberikan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sepanjang tahun 2023, Selasa (19/12/2023).

Ombudsman menegaskan bahwa penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto menjelaskan, hal ini merupakan instrumen strategis untuk menilai kinerja pelayanan publik yang ada di Provinsi Riau.

"Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publik guna mencegah praktek malaadministrasi," kata Hery Susanto.

Penilaian ini berfokus pada integritas, keadilan non-diskriminasi, akuntabilitas, keseimbangan, dan keterbukaan. Ruang lingkupnya mencakup kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

"Hasil penilaian akan dikategorikan dalam tiga zona, zona hijau (tinggi), kuning (sedang), dan merah (rendah)," cakupnya lagi.

Dua aspek penilaian utama mencakup atributif fisik, yang mengukur pemenuhan standar pelayanan publik, dan aspek substantif terkait kepatuhan terhadap produk hukum dari Ombudsman.

"Kami ingin pelayanan publik tidak hanya fokus pada aspek fisik dan anggaran, tapi juga pada kepatuhan substantif. Jika ada laporan atau rekomendasi yang tidak dilaksanakan, penghargaan zona hijau terbaik akan ditahan hingga tindak lanjut dilakukan," jelas Hery Susanto.

Sementara itu Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih menegaskan agar kepala daerah tetap menjalankan pelayanan publik yang baik di tahun politik.

"Jangan sampai tahun politik ini membuat pelayanan publik menjadi kendor, sebab di tahun politik tidak akan menyurutkan niat masyarakat untuk mengurus segala administrasi," pintanya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama mengatakan, baik Pemerintah Provinsi Riau dan 12 kabupaten dan kota di Riau sudah berada di zona hijau.

"Tapi untuk kepolisian yang memiliki nilai tinggi Polres Pelalawan, itupun nilainya B. Yang lain ada yang nilainya C dan

D," sebutnya.

Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten kota, ada 7 BPN yang masuk dalam kategori A dan B.

"Mudah-mudahan lembaga vertikal ini bisa mengikuti perkembangan ataupun perbaikan yang dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah, sehingga tahun depan bisa masuk ke dalam zona hijau," jelasnya.

Walikota Dumai, Paisal mengaku bersyukur atas naiknya nilai untuk Pemko Dumai di tahun 2023 ini.

"Kami sangat bersyukur terjadi peningkatan yang sebelumnya kami kategori sedang. Dan saya berterima kasih pada Kepala Ombudsman Perwakilan Riau dalam membimbing Kota Dumai serta seluruh OPD terkait yang berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.

- Berikut Nilai Tingkat Kabupaten dan Kota di se-Provinsi Riau

1. Kabupaten Bengkalis: Kategori A dengan nilai 95.91

2. Kota Pekanbaru: Kategori A dengan nilai 91.95

3. Kabupaten Kampar: Kategori A dengan nilai 90.33

4. Kota Dumai: Kategori A dengan nilai 88.83.

5. Kabupaten Siak: Kategori B dengan nilai 87.20

6. Kabupaten Rokan Hulu: Kategori B dengan nilai 86.26

7. Kabupaten Rokan Hilir: Kategori B dengan nilai 85.10

8. Kabupaten Pelalawan: Kategori B dengan nilai 83.95

9. Kabupaten Indragiri Hilir: Kategori B dengan nilai 83.01

10. Kabupaten Indragiri Hulu: Kategori B dengan nilai 82.00

11. Kabupaten Kuantan Singingi: Kategori B dengan nilai 81.38

12. Kabupaten Kepulauan Meranti: Kategori B dengan nilai 81.23

- Nilai Tingkat Badan Pertanahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar: Kategori A dengan nilai 91.75.c

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan: Kategori A dengan nilai 91.48

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir: Kategori A dengan nilai 89.76

4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis: Kategori A dengan nilai 87.55

5. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru: Kategori B dengan nilai 86.32

6. Kantor Pertanahan Kabupaten Siak: Kategori B dengan nilai 82,11

7. Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu: Kategori B dengan nilai 81.39

- Nilai Tingkat Polres se-Provinsi Riau

1. Polres Pelalawan: Kategori B dengan nilai 80.58